

BAB V

KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan mengacu pada bab I serta hasil analisis pada bab IV. Sesuai dengan rumusan masalah pada bab I, terdapat empat hal yang penulis simpulkan dalam bab ini sehubungan dengan permasalahan yang dibahas pada skripsi yang berjudul “Kebijakan Politik Luar Negeri Perdana Menteri Plaek Phibun Songkhram di Thailand Tahun 1938-1944” ini.

Pertama, kondisi sosial-politik Thailand sebelum Phibun menjadi Perdana Menteri Thailand tahun 1932-1938, tidak terlepas dari serangkaian perubahan yang mendasar pada bentuk pemerintahan negara ini. Thailand adalah sebuah negara yang menganut bentuk pemerintahan monarki absolut dimana raja memegang kekuasaan penuh sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan, namun setelah terjadi Revolusi Thailand tahun 1932 bentuk pemerintahannya berubah. Revolusi Thailand tanggal 24 juni 1932 ini adalah kudeta tak berdarah yang dilancarkan oleh sekelompok orang yang menyebut diri mereka sebagai “Promotor”, yang telah menggulingkan kekuasaan Raja Prajadhipok (Rama VII). Revolusi ini dipicu oleh ketidakpercayaan rakyat atas kemampuan raja dalam mengatasi krisis ekonomi di Thailand. Revolusi ini berhasil merubah bentuk pemerintahan Thailand menjadi monarki konstitusional dimana terdapat pembatasan kekuasaan raja yang hanya berperan sebagai simbol negara saja atau

hanya menjadi kepala negara, sedangkan sistem pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri.

Setelah terjadi revolusi, maka para Promotor yang terdiri dari kelompok militer dan sipil menguasai kehidupan politik di Thailand, dan dibentuklah Majelis Nasional yang membuat undang-undang sementara Thailand. Yang menjadi Perdana Menteri Thailand untuk pertama kalinya adalah Phya Manopakorn Nititada (28 Juni 1932-21 Juni 1933) ia adalah seorang tokoh yang berasal dari kaum militer tua yang memimpin revolusi tahun 1932. Kemudian pada tahun 1933 ia digantikan oleh Phya Phahon (21 Juli 1933-16 Desember 1938). Pada masa pemerintahan Phya Phahon, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Pangeran Baworadet, namun dapat ditumpas oleh Jenderal Plaek Phibun Songkhram.

Pada masa pemerintahan PM Phya Phahol, pemerintahan Thailand didominasi oleh kaum militer. Bahkan terdapat tekanan terhadap kekuasaan raja, yang dibuktikan pada bulan Maret 1935 Raja Prajadhipok melepaskan kekuasaannya tanpa menyebut nama seorang pengganti, pemerintah PM Phya Phahon menyalahgunakan kekuasaannya dalam membatasi hak veto kerajaan.

Kedua, keberhasilan Phibun menjadi Perdana Menteri Thailand di tahun 1938. Setelah mendapatkan ilmu kemiliteran di Thailand maupun di Perancis, pada tahun 1934 Phibun menjadi Menteri Pertahanan dan mulai menggunakan kekuatan menterinya ini untuk membangun konstituen politik di dalam tentara. Ia kemudian mendirikan organisasi pemuda paramiliter pada model fasis yang

kemudian populer dan secara terbuka menyatakan pandangan Ultrationalisme dan Iredentisme (gerakan persatuan wilayah). Phaya Phahol menyatakan pensiun dari jabatannya sebagai perdana menteri tahun 1938 karena alasan sakit. Kemudian munculah Phibun menggantikannya sebagai perdana menteri yang memiliki dukungan dari anggota majelis yang konservatif dan kelompok militer.

Ketiga, Kebijakan politik luar negeri yang dikeluarkan PM Phibun di Thailand pada tahun 1938-1944 meliputi perubahan nama negara tahun 1939, Perang Thailand-Perancis tahun 1940-1941, dan aliansi militer Thailand-Jepang tahun 1941-1944. Perubahan nama negara dari Siam menjadi Thailand pada tahun 1939, merupakan salah satu ambisi PM Phibun untuk membangun Thailand menjadi lebih besar, yang akan menyatukan bangsa Thailand di Laos, Burma, dan mungkin juga Cina, menjadi satu negara Thailand di bawah kepemimpinannya. Hal ini disebabkan karena PM Phibun ingin mendapatkan kembali wilayah Thailand di Indochina yang telah direbut oleh Perancis pada abad ke-19.

Kebijakan ini menyebabkan pecahnya Perang Thailand-Perancis tahun 1940-1941. Perancis yang berada dalam kehancuran setelah invasi Jerman pada awal Perang Dunia II, meminta Thailand untuk melakukan negosiasi dalam menyelesaikan sengketa wilayah di Indochina. Kemudian dilakukanlah berbagai macam perjanjian non-agresi antara kedua negara. Namun akhirnya mengalami jalan buntu, karena kedua negara tidak menyepakati hasil dari perjanjian non-agresi tersebut. Akhirnya pecahlah Perang Thailand-Perancis di tahun 1941, yang

mengakibatkan kedua negara negara mengerahkan seluruh kekuatan militernya untuk memenangkan perang.

Kemudian munculah Jepang sebagai pihak mediator, yang menganggap bahwa perang tersebut harus dihentikan dan diselesaikan dalam meja diskusi. Thailand dan Perancis pun sepakat dan kemudian menyepakati gencatan senjata pada tanggal 28 Januari 1941. Pada tanggal 9 Mei 1941, perjanjian perdamaian ditandatangani di Tokyo, dengan keputusan bahwa Perancis di paksa oleh Jepang untuk melepaskan kekuasaan mereka di wilayah perbatasan yang disengketakan. Namun akibat dari perjanjian ini, Thailand terpaksa setuju untuk bekerja sama dengan Jepang. Dan akhirnya perjanjian aliansi militer Thailand-Jepang diresmikan tanggal 21 Desember 1941.

Aliansi militer Thailand-Jepang menyebabkan Thailand menjadi sekutu Jepang dan ikut dalam Perang Dunia II membantu Jepang menghadapi Sekutu. Pada tanggal 25 Januari 1942, Thailand menyatakan perang terhadap Inggris dan Amerika Serikat. Namun kebijakan politik luar negeri PM Phibun ini ditentang oleh Pridi Banomyong dan Seni Pramoj, yang dengan bantuan dari *American Office of Strategic Service (OSS)* membentuk *Free Thai Movement* (Gerakan Thailand Merdeka). Gerakan ini bertujuan untuk menghancurkan kekuasaan Jepang di Thailand dan untuk menggulingkan pemerintahan PM Phibun. Setelah Jepang kalah pada Perang Dunia II, PM Phibun pun dipaksa oleh kelompok oposisi untuk mundur dari jabatannya sebagai perdana menteri.

Sedangkan kebijakan politik dalam negeri yang dikeluarkan oleh PM Phibun di Thailand pada tahun 1938-1944 meliputi peningkatan biaya militer, perbaikan perekonomian Thailand, dan rekonstruksi budaya masyarakat Thailand. Peningkatan biaya militer dilakukan oleh PM Phibun untuk mempersiapkan Thailand memasuki Perang Dunia II dan untuk meningkatkan legitimasi militer pada kekuasaannya di Thailand. Perbaikan perekonomian Thailand dilakukan untuk meningkatkan perekonomian dan perdagangan Thailand yang hancur dan untuk bisa menyejahterakan rakyat Thailand. Diskriminasi terhadap warga Cina di Thailand juga dilakukan untuk memperbaiki perekonomian Thailand. Sedangkan rekonstruksi budaya dilakukan oleh PM Phibun untuk mengubah Thailand menjadi negara yang beradab dan modern.

Keempat, dampak kebijakan politik luar negeri PM Phibun di Thailand tahun 1938-1944. Selama PM Phibun berkuasa di Thailand dari tahun 1938-1944 terjadi perubahan yang signifikan pada kehidupan sosial-politik di Thailand. Nasionalisme yang merupakan fokus kebijakan PM Phibun, merubah nama negara menjadi Thailand pada tahun 1939. Selain itu juga militer Thailand menjadi semakin besar dan kuat, karena PM Phibun mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk meningkatkan militer Thailand.

Dalam bidang ekonomi, kebijakan politik luar negeri PM Phibun yang mengikutsertakan Thailand pada Perang Dunia II, menyebabkan perekonomian Thailand hancur, dimana terjadi inflasi yang cukup besar dan biaya hidup menjadi

meningkat. Warga Cina di Thailand pun mendapat diskriminasi yang cukup besar, dimana mereka ditekan untuk tidak mengembangkan perdagangannya di Thailand.

Dalam bidang budaya, PM Phibun mewajibkan setiap rakyat Thailand untuk bisa mengadopsi kebudayaan ala Barat dan meninggalkan kebiasaan tradisional. Seperti halnya perubahan pada gaya berpakaian dan pemakaian sendok dan garpu ketika akan makan. Hal ini dilakukan oleh PM Phibun untuk menunjukkan pada dunia bahwa Thailand adalah negara yang beradab dan modern.

